

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Percepat Penanganan Banjir

Normalisasi Sungai Ciliwung Terbengkalai

JAKARTA-Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggenjot normalisasi sungai. Di antaranya normalisasi kali pada daerah-daerah yang terdampak banjir dari luapan Kali Ciliwung. Dan, pada tahun ini juga, menargetkan normalisasi sebagai bagian mengatasi banjir akan beres.

Hanya, pantauan INDOPOS di lapangan, kemarin (9/1), untuk di Sungai Ciliwung, praktis tak ada aktivitas normalisasi. Seperti di kawasan perbatasan Pasar Rebo dengan Pasar Minggu, turap di bantaran Sungai Ciliwung, terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Disebut-sebut terganjal pembebasan lahan.

"Kalau di kawasan Sungai Ciliwung, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, sejak lengsernya Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, proyek pengerjaan normalisasi sungainya disetop.

Pada 2017, saat Ahok diproses hukum langsung stop. Sebenarnya awal 2017 sungai sudah dikeruk beko," ujar Pandiangan, 46, warga setempat ■

Pandiangan menambahkan, jika normalisasi berlanjut, otomatis warga di bantaran Sungai Ciliwung, sepanjang aliran perbatasan Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan ini angkat kaki. "Jika tidak, bangunan pasti akan longsor atau ambruk. Sebab, pengerjaannya kan butuh ruang gerak pekerja," ungkapnya sembari menunjukkan di sebelah selatan sudah dipasang turap. Namun demikian, di sisi timur normalisasi belum dilanjutkan alias terhenti. "Nggak tahu kapan mau dikerjakan lagi normalisasi sungai ini," ujar dia usai mengambil telur ayam peliharaannya, Rabu (9/1) siang.

Dari informasi yang dihimpun, seperti halnya di RT10 RW 1, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, rata-rata warga mengontrak dan tidak memiliki surat dokumen tanah. Tetapi bagian seberang selatan hampir semua warga memiliki dokumen surat tanah. "Di Gedong, Pasar Rebo, ini ada sekitar 70 kepala keluarga. Tetapi warga yang membangun rumah di sini masih ada saja. Kan belum tahu juga apakah pengerjaannya dilanjutkan atau tertunda lama. Apalagi mau pemilu pertengahan 2019," lanjutnya.

Di tempat lain, untuk mengendalikan banjir, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Kota Administrasi Jakarta Selatan, melanjutkan pengerukan Embung Kebagusan di RT 01/RW 03 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Holi Susanto mengatakan, pengerukan telah dilakukan pada awal Desember 2018 dan kembali dilanjutkan pada 2 Januari 2019. "Rencananya pengerukan ditargetkan empat bulan ke depan," ujarnya, Rabu (9/1) siang.

Holi menjelaskan, sesuai dengan Peta Trace Embung nomor 761/S/PPSK/DTR/XII/2013, embung tersebut memiliki luas kurang lebih 9.883 meter persegi. "Luas area yang sudah dibebaskan sebanyak lima bidang dengan seluas 7.926 meter persegi," terangnya.

Pengerukan Embung Kebagusan, lanjut Holi, untuk menambah ruang terbuka biru di wilayah Jakarta Selatan. Nantinya keberadaan embung ini bertujuan sebagai daerah resapan air di wilayah Kebagusan, khususnya RW 03 dan sekitarnya.

"Selain itu, sebagai daerah parkir air atau pengendali banjir dari aliran Kali Pulo yang melintas di sisi Embung Kebagusan. Diharapkan dengan terbangunnya Embung Kebagusan ini, dapat mengurangi genangan yang terjadi akibat tingginya debit air Kali Pulo," imbuhnya.

Kasie Pemeliharaan Firman-syah, menambahkan, kedalaman pengerukan bervariasi antara dua hingga empat meter. Sedangkan lumpur hasil pengerukan dibuang di pinggir embung yang nantinya dapat digunakan sebagai jalan inspeksi.

"Sebanyak 10 petugas SDA yang dikerahkan terdiri atas empat orang operator dan enam orang Satgas untuk mendukung kegiatan tersebut, serta dua unit ekskavator," ujarnya.

Sebelumnya, kawasan Pasar Jagal Mampang, sering menjadi langganan banjir. Disebabkan oleh limpasan Kali Mampang. "Solusinya, harus dinormalisasi. Rumah-rumah yang ada dipinggir kali harus ditertibkan. Pasar Jagal ini luapan Kali Mampang. Ketersediaan rusun di Jaksel, buat relokasi warga belum ada," ujarnya.

Terpisah, DPRD DKI Jakarta mendorong percepatan penanganan banjir oleh Pemprov DKI Jakarta. Baik itu melalui normalisasi sungai maupun dengan konsep naturalisasi. Karena mereka menilai, upaya penanganan banjir tersebut perlu ditingkatkan lagi.

"Kami ingin melihat program penanganan banjir dilakukan secara cepat. Gubernur mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai sebelumnya. Namun yang terjadi

kemajuan-kemajuan nyata dalam penanganan pembangunannya tidak terasa," ujar Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, Rabu (9/1).

Rio mengatakan, pihaknya paham konsep naturalisasi yang diwacanakan itu, mengatur agar sungai bisa mengelola air dengan baik dengan mempertahankan ekosistem aslinya.

Namun, konsep itu dinilai tidak selaras dengan konsep dari pemerintah pusat. Rio mengatakan konsep normalisasi yang dimiliki Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) bukan sekadar membeton sungai tetapi juga mengembalikan lebar dan kedalaman sungai. Konsekuensinya adalah Pemprov DKI harus melakukan pembebasan lahan. "Kini konsep normalisasi Pemprov DKI

jadi tak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Rio.

Menurut Rio, BBWSCC sampai mengembalikan anggaran normalisasi sungai ke APBN karena Pemprov DKI tidak membebaskan lahan. Akibatnya, ada 129 titik di Jakarta yang rawan banjir karena normalisasi tidak dilanjutkan.

Rio meminta Pemprov DKI untuk tak segan melanjutkan program normalisasi. "Sudahlah yang terbukti berhasil baik dari normalisasi sudah sepatutnya dilanjutkan," terang dia.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, anggaran penanganan banjir harus diberikan semaksimal mungkin. Jangan sampai berkurang, apalagi dipotong seperti pada anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 lalu. "Jika serius menangani banjir, jangan sampai dipotong ang-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Percepat Penanganan Banjir

garannya," kata dia.

Nirwono menjelaskan, jika Pemprov DKI Jakarta serius menangani banjir, anggaran penanggulangan seharusnya ditambah. Masih banyak pekerjaan rumah mengenai masalah ini.

Di sisi lain, rehabilitasi saluran air kota baru 33 persen yang berfungsi. Revitalisasi penampungan air, lanjut dia, hanya ada di Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Danau Sunter. "Masih ada 41 waduk dan 14 setu yang belum ditata," ucap Nirwono.

Dia menambahkan, naturalisasi 13 sungai di ibu kota, hanya beberapa yang terlaksana, seperti Kali Ciliwung, Kali Pesangrahan, Kali Angke, dan Sunter yang belum terserap 50 persen. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) juga belum mencapai target. "Sementara RTH yang baru mencapai 9,98 persen dari target 30 persen yang harus dibangun," kata Nirwono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan keseriusannya dalam mengantisipasi bahaya banjir di ibu kota, baik itu dengan normalisasi sungai maupun naturalisasi. "Kita jalan terus. Mudah-mudahan tidak ada masalah nantinya," kata Anies, Senin (3/12).

Kelanjutan program tersebut terlihat dari program anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI 2019.

Untuk pelaksanaan program normalisasi sungai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengalokasi anggaran pengadaan tanah sungai dan saluran sebesar Rp 500 miliar.

Usulan anggaran tersebut ditujukan untuk biaya pembebasan lahan di daerah bantaran sungai, seperti di Sungai Ciliwung yang sempat berhenti sejak 2017.

Normalisasi sungai dilakukan dengan betonisasi atau sheet pile sungai, atau pembuatan turap sungai dan saluran air yang ada di Jakarta. Tidak hanya itu, normalisasi juga dilakukan pada 14 sarana pengendali banjir seperti waduk, embung, dan setu.

Untuk program normalisasi sungai, 241 alat berat dikerahkan di beberapa lokasi. Di antaranya di Waduk Cimanggis, Embung Aselih, Embung Jalan Cendrawasih, Waduk Pekayon, Waduk Pondok Rangan, Embung Jalan Sejuk, dan Waduk Cilangkap Giri Kencana.

Juga di Waduk Jagakarsa, Waduk Jakan Kaja, Kalibaru Timur,

Waduk Kampung Rambutan, Waduk Babek TNI, Embung Kelurahan Semper Barat, dan Embung Jalan Cilincing Kesatrian.

Namun Anies meminta publik tidak menyamakan antisipasi musim hujan dengan betonisasi atau normalisasi sungai. "Itu dua hal yang berbeda," tegasnya. Sepanjang 2013-2017, normalisasi Sungai Ciliwung telah dilakukan sepanjang 16,388 dari 33,69 kilometer panjang sungai yang harus dinormalisasi. (ibl/wok)